



TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN PENGUNGKAPAN RISIKO: BUKTI DARI PARA PENGADOPSI PELAPORAN TERINTEGRASI (Studi empiris pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024)

Rhino Ariel Septyanto, Muchamad Syafruddin¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone:+6285756111210

ABSTRACT

This study was designed to explore the extent to which corporate governance quality moderates or influences the breadth and depth of risk information disclosure in integrated reports among Indonesian non-financial issuers. The variables utilized in this research are Board of Commissioner Size (UDK), Board of Commissioner Gender Diversity (KGDK), Board of Commissioner Independency (IDK), and Board of Commissioner Meeting Frequency (FRDK) as independent variables, the Risk Disclosure Indeks (IPR) as the dependent variable, as well as Profitability (PROF), Company Size (UkP), Company Age (UmP), High-Technology Industry (ITT), Environmental Sensitivity (SL), and Audit Committee Size (UKA) as control variables.

This study observed the population of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2024. Through the application of purposive sampling techniques, 153 observations relevant to the research criteria were obtained. Furthermore, hypothesis verification was carried out using multiple linear regression analysis with computational support from SPSS (Statistical Product and Service Solutions) software.

Research findings indicate that the size of the Board of Commissioners and gender diversity on the Board of Commissioners have a significant negative impact on the extent of risk disclosure in integrated reports. Meanwhile, Board of Commissioner Independency and Board of Commissioner Meeting Frequency were found to have no significant impact on the extent of risk disclosure in integrated reports.

Keywords: Corporate Governance, Risk Disclosure, Integrated Reporting, Board Of Commissioner

PENDAHULUAN

Beberapa tahun belakangan, manipulasi laporan keuangan telah sering terjadi, seperti pada kasus PT Asuransi Jiwasraya, PT Hanson Internasional, PT Garuda Indonesia, dan beberapa perusahaan lainnya dengan aktivitas bermasalah lainnya. Hal ini menyebabkan para pengguna laporan keuangan meragukan keakuratan dan transparansi perusahaan (Melani & Amin, 2016). Fenomena ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan sering kali hanya terikat pada kepatuhan standar akuntansi, namun mengabaikan penyajian gambaran komprehensif mengenai kondisi substantif perusahaan bagi investor. Akibatnya, terdapat tuntutan dari pemangku kepentingan agar laporan tahunan menyajikan informasi yang lebih transparan mencakup aspek-nonkeuangan di damping data finansial (Januarti et al., 2025). Dalam konteks ini, pengungkapan risiko muncul sebagai elemen non-keuangan krusial yang berfungsi sebagai instrumen untuk memulihkan kepercayaan publik dan memitigasi kecurangan pelaporan keuangan (Gunawan & Zakiyah, 2017; Melani & Amin, 2016).

Meskipun tuntutan transparansi meningkat, praktik pengungkapan konvensional sering kali hanya bersifat “*box-ticking*” atau sekadar menggugurkan kewajiban regulasi, sehingga yang dihasilkan cenderung bersifat umum (*boilerplate*) dan berfokus pada data masa lalu (*backward-*

¹ Corresponding author



looking) (Raimo et al., 2022). Sebagai solusi, pelaporan perusahaan kini bergeser menuju Laporan Terintegrasi (*Integrated Reporting*). Laporan Terintegrasi menyajikan interkoneksi secara sistematis antara strategi, tata kelola, dan kinerja perusahaan dengan lingkungan eksternalnya dalam proses penciptaan nilai jangka pendek hingga jangka panjang (IIRC, 2021). Di Indonesia, penerapan Laporan Terintegrasi masih bersifat sukarela (*voluntary*), namun perusahaan nasional yang konsisten menyajikan laporan keberlanjutan berkualitas sejatinya memiliki tingkat kesiapan (*readiness*) yang memadai untuk bertransisi ke arah tersebut (Setiawan, 2016).

Ketidakeragaman praktik pengungkapan risiko pada laporan terintegrasi menunjukkan bahwa keputusan transparansi sangat dipengaruhi oleh motivasi manajemen. Perspektif Teori Agensi menjelaskan bahwa interaksi antara prinsipal dan agen sering kali memicu asimetri informasi, di mana manajer memiliki dorongan oportunistik untuk memanipulasi atau menahan informasi sensitif terkait risiko demi memaksimalkan utilitas pribadi (Jensen & Meckling, 1976; Raimo et al., 2022). Untuk memitigasi perilaku tersebut, diperlukan mekanisme pengawasan efektif melalui Dewan Komisaris. Dstruktur dewan yang kuat diharapkan dapat menekan biaya agensi (*agency cost*) dengan cara “memaksa” manajemen meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan risiko dalam laporan terintegrasi (Ibrahim et al., 2022).

Sejumlah peneliti terdahulu mengenai karakteristik dewan komisaris dan pengungkapan risiko menghasilkan temuan yang inkonsisten. (Raimo et al., 2022) menemukan hubungan positif pada gender, independensi, dan frekuensi rapat, namun ukuran dewan tidak signifikan. Sebaliknya, (Al-Dubai & Alotaibi, 2023) melaporkan ukuran dewan berpengaruh positif sementara independensi berpengaruh negatif. Di Indonesia, Viola et al. (2023) menemukan ukuran dewan berdampak positif, namun (Chandra et al., 2024) justru merekam pola berbeda dengan adanya hubungan negatif antara keberagaman gender dan pengungkapan risiko. Kontradiksi temuan ini menurut Chandra et al. (2024) serta (Ekananda et al., 2025) menegaskan bahwa determinan pengungkapan risiko di Indonesia masih menjadi area yang memerlukan pembuktian empiris lebih lanjut.

Tingginya ekspektasi pasar modal mendorong urgensi penelitian ini untuk mengevaluasi populasi Perusahaan sektor non-keuangan di Bursa Efek Indonesia. Dengan mereplikasi desain penelitian dari (Raimo et al., 2022), penelitian ini bertujuan melakukan investigasi empiris mengenai korelasi antara karakteristik dewan komisaris yang terdiri dari ukuran dewan, diversitas gender, latar belakang independensi, dan frekuensi rapat dengan transparansi risiko pada laporan terintegrasi. Hubungan ini dianalisis dengan mengontrol pengaruh variabel profitabilitas, ukuran Perusahaan, usia Perusahaan, sensitivitas lingkungan, klasifikasi industri teknologi tinggi, dan ukuran komite audit.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Agency Theory

Teori agensi mendeskripsikan struktur korelasi di mana prinsipal mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Disparitas kepentingan dan asimetri informasi memicu perilaku oportunistik agen yang menyembunyikan informasi risiko demi memaksimalkan utilitas pribadi (Cerbioni & Parbonetti, 2007; Raimo et al., 2022). Konflik agensi ini dimitigasi melalui pemisahan tegas fungsi manajerial dengan fungsi supervisi oleh dewan komisaris (Fama & Jensen, 1983). Sebagai mekanisme pengawasan, dewan komisaris berperan mengurangi *agency problem* dengan mempromosikan transparansi melalui perluasan pengungkapan informasi korporat guna meminimalkan kesenjangan informasi (Ntim et al., 2013; Raimo et al., 2022).



Upper Echelons Theory

Teori eselon atas menyatakan bahwa organisasi merupakan refleksi dari para manajer puncaknya, di mana hasil-hasil organisasi dapat diprediksi melalui karakteristik latar belakang manajerial para pengambil keputusan (Hambrick & Mason, 1984). Karakteristik demografis seperti gender digunakan sebagai proksi dari basis kognitif dan nilai-nilai yang membentuk cara dewan menafsirkan kedalaman informasi risiko. Mengingat pelaporan terintegrasi di Indonesia masih bersifat sukarela, dewan komisaris memiliki diskresi manajerial yang besar untuk memutuskan luasnya pengungkapan (Hambrick, 2007). Dalam kondisi tugas yang kompleks, karakteristik psikologis seperti kehati-hatian dan keengganan terhadap risiko (*risk aversion*) yang dikaitkan dengan gender perempuan menjadi dominan dalam memengaruhi kebijakan pelaporan.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan serangkaian kegiatan organisasi yang dilakukan untuk memberikan hasil paling menguntungkan dan mengurangi volatilitas dari hasil tersebut (Hopkins, 2017). Perusahaan menerapkan manajemen risiko sebagai mekanisme strategis untuk merespons risiko melalui empat strategi utama : *tolerate, treat, transfer, dan terminate* (Hopkins, 2017). Implementasi system ini berkontribusi langsung terhadap optimasi kinerja serta menjadi mekanisme pencegahan terhadap kegagalan korporat (Darmawi, 2005 dalam Anisa & Prastiwi, 2012). Secara fungsional, manajemen risiko memberikan rasa kepastian bagi manajemen dan berperan sebagai instrument untuk merespons peluang eksternal dalam mendukung realisasi objektif korporasi (Hopkins, 2017; Salsabila & Hidayat, 2024).

Pengungkapan Risiko

Risiko adalah dampak ketidakpastian terhadap tujuan yang mencakup sisi negatif (ancaman) dan sisi positif (peluang) (Seta & Setyaningrum, 2018). Pengungkapan risiko dikonseptualisasikan sebagai proses penyampaian informasi menyeluruh tentang profil risiko perusahaan yang memengaruhi kelangsungan hidup entitas (Ibrahim et al., 2022). Praktik pengungkapan sukarela berfungsi sebagai instrumen pengendalian sekaligus akuntabilitas yang krusial dalam menekan biaya keagenan (Cerbioni & Parbonetti, 2007). Dalam literturnya, identifikasi risiko dilakukan melalui analisis konten menggunakan indeks pengungkapan risiko atau perhitungan narasi (Mbithi et al., 2022). Namun, korporasi di Indonesia memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan informasi risiko yang “baik” guna menghindari dampak buruk bagi citra perusahaan (Seta & Setyaningrum, 2018).

Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan dikonseptualisasikan sebagai kerangka kerja sistemik yang mengintegrasikan struktur dan prosedur formal guna memonitor aktivitas organisasi secara akuntabel (Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021). *Good Corporate Governance* (GCG) melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menetapkan tujuan perusahaan serta memastikan tercapainya sasaran dan terpantaunya kinerja organisasi (Muslih & Maghfiroh, 2023). GCG Berlandaskan pada pilar perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan demi meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan (Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021). Selain itu, tata kelola berfungsi sebagai instrumen untuk menyelesaikan konflik kepentingan dan memberi solusi atas masalah keagenan (*agency problem*) bagi tiap pemilik maupun pengelola (Anggraeni & Irdianty, 2023; Juniarti et al., 2025).

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Risiko

Teori Agensi menempatkan dewan komisaris sebagai mekanisme *check and balance* utama untuk menyelaraskan kepentingan serta mengurangi asimetri (Ekananda et al., 2025; Raimo et al., 2022). Terdapat *trade-off* mengenai dampak ukuran dewan; di satu sisi, jumlah anggota yang lebih besar diasosiasikan dengan kapasitas pengawasan yang kuat dan diversifikasi keahlian yang meningkatkan cakupan pengungkapan risiko (Viola et al., 2023). Namun di sisi lain, perspektif inefisiensi menyoroti bahwa dewan yang terlalu besar rentan terhadap masalah koordinasi, komunikasi, serta *free rider* yang dapat memperlambat pengambilan keputusan strategis (Jensen, 1993 dalam Al-Maghzom et al. 2016). Mengingat adanya tarik-menarik antara manfaat keahlian dan risiko inefisiensi tersebut, ukuran dewan dianggap sebagai determinan krusial yang memengaruhi tingkat transparansi perusahaan (Raimo et al., 2022). Berdasarkan uraian tersebut, diajukan hipotesis berikut :

H1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko dalam laporan terintegrasi.

Pengaruh Keanekaragaman Gender Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Risiko

Meskipun teori keagenan mengharapkan kehadiran perempuan meningkatkan pengawasan, karakteristik psikologis yang cenderung menghindari risiko (*risk averse*) dapat membatasi transparansi guna mencegah reaksi pasar yang berlebihan (Raimo et al., 2022). Karakteristik keputusan anggota dewan perempuan yang lebih selektif dan *prudent* dalam konteks informasi sensitif justru dapat mendorong pembatasan pengungkapan risiko untuk menjaga posisi kompetitif perusahaan (Medidjati et al., 2023; Raimo et al., 2022). Selain itu, keberagaman gender berpotensi meningkatkan konflik akibat perbedaan pandangan yang menghambat konsensus mengenai materi pengungkapan (Medidjati et al., 2023). Hal ini didukung bukti empiris yang mengidentifikasi korelasi negatif antara diversitas gender dan luas pengungkapan risiko (Chandra et al., 2024). Berdasarkan uraian tersebut, diajukan hipotesis berikut :

H2 : Keanekaragaman gender dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan risiko dalam laporan terintegrasi.

Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Risiko

Dalam kerangka teori keagenan, keberadaan komisaris independen berperan sebagai mekanisme *checks and balances* esensial untuk memitigasi potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Akram & Abrar Ul Haq, 2022). Tanpa adanya afiliasi operasional, komisaris independen mampu mempertahankan objektivitas tinggi guna mengantisipasi perilaku oportunistik manajemen (Lidya Primadona et al., 2024). Mekanisme pengawasan ini memberikan tekanan kepada manajemen agar mengurangi asimetri informasi melalui pengungkapan risiko yang lebih transparan dalam pelaporan terintegrasi (Raimo et al., 2022). Selain itu, komisaris independen memiliki insentif menjaga kredibilitas profesional dan memperjuangkan kepentingan pemegang saham minoritas melalui pemenuhan standar kualitas pelaporan (Muslih & Damayanti, 2025). Hal ini didukung penelitian terdahulu yang mengonfirmasi korelasi positif signifikan antara proporsi komisaris independen dengan tingkat keterbukaan informasi risiko. Berdasarkan fondasi tersebut, diajukan hipotesis berikut :

H3 : Independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan risiko dalam laporan terintegrasi.

Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Risiko

Frekuensi rapat dewan komisaris merupakan proksi utama yang mencerminkan aktivitas, ketekunan (*diligence*), dan efektivitas dewan dalam menjalankan fungsi pengawasannya (Raimo et al., 2022). Berdasarkan perspektif teori keagenan, intensitas pertemuan yang tinggi menyediakan alokasi waktu memadai bagi dewan untuk memantau tindakan manajemen serta memastikan integritas proses pelaporan perusahaan (Alshirah et al. 2020 dalam Al-Matari & Al-Dubai, 2025). Dalam konteks laporan terintegrasi yang kompleks, dewan yang aktif memiliki kapasitas lebih besar untuk mengidentifikasi risiko finansial maupun non-finansial dan mendorong pengungkapannya secara transparan (Saggar & Singh, 2017 dalam Raimo et al., 2022). Bukti empiris menegaskan bahwa dewan yang responsif melalui rapat rutin terbukti berpengaruh signifikan dalam meningkatkan luas pengungkapan risiko. Berdasarkan uraian di atas, diajukan hipotesis :

H4 : Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan risiko dalam laporan terintegrasi.

METODE PENELITIAN

Penentuan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2024. Sektor keuangan dikecualikan mengingat adanya perbedaan struktural model bisnis serta kerangka regulasi dan standar akuntansi yang berbeda (Raimo et al., 2022). Dalam pemilihan sampel berdasarkan pada kriteria tertentu atau *purposive sampling*, kriterianya sebagai berikut :

1. Perusahaan merupakan entitas non-keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2024.
2. Perusahaan-perusahaan yang menerbitkan dan mempublikasikan laporan terintegrasi secara eksplisit pada periode tahun 2024.
3. Perusahaan-perusahaan dengan kelengkapan data yang berkaitan dengan variabel independen serta variabel kontrol; perusahaan dengan data yang tidak lengkap tidak digunakan pada penelitian.

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu variabel dependen, variabel independen dan variabel kontrol. Berikut adalah variabel yang digunakan beserta pengukurannya :

Tabel 1
Variabel dan Pengukurannya

Variabel	Simbol	Pengukurannya
Variabel Dependen		
Indeks Pengungkapan Risiko	IPR	Sistem skor biner (0-1) pada 45 item. Indeks yang dipakai adalah indeks milik Raimo et al., 2022.
Variabel Independen		
Ukuran Dewan Komisaris	UDK	Jumlah total anggota yang tercatat dalam komposisi dewan komisaris pada akhir periode pelaporan.
Keanekaragaman Gender Dewan Komisaris	KGDK	Persentase anggota dewan komisaris wanita dibandingkan dengan total jumlah seluruh anggota dewan komisaris.
Independensi Dewan Komisaris	IDK	Persentase anggota dewan komisaris yang tidak memiliki keterkaitan bisnis, hubungan keluarga, atau afiliasi dengan manajemen dan pemegang saham pengendali (Komisaris Independen)

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	FRDK	Total frekuensi pertemuan (rapat) yang dilaksanakan oleh dewan komisaris, baik rapat internal maupun rapat gabungan dengan direksi, selama satu tahun.
Variabel Kontrol		
Profitabilitas	PROF	<i>Return on Equity</i> (ROE)
Ukuran Perusahaan	UkP	Logaritma natural (Ln) dari total aset perusahaan pada akhir periode pelaporan.
Umur Perusahaan	UmP	Jumlah tahun yang telah dilalui sejak perusahaan didirikan hingga tahun periode penelitian.
Industri Teknologi Tinggi	ITT	<i>Dummy variable</i> dengan nilai 1 jika perusahaan beroperasi dalam sektor teknologi tinggi (<i>high-tech</i>) dan 0 jika sebaliknya.
Sensitivitas Lingkungan	SL	<i>Dummy variable</i> dengan nilai 1 jika perusahaan beroperasi pada sektor yang memiliki sensitivitas lingkungan tinggi dan 0 jika sebaliknya.
Ukuran Komite Audit	UKA	Jumlah total anggota yang tercatat sebagai bagian dari komite audit perusahaan.

Catatan : Sektor-sektor yang digolongkan memiliki sensitivitas lingkungan tinggi meliputi pertambangan, minyak dan gas, bahan kimia, konstruksi, kehutanan dan kertas, logam, transportasi, listrik, serta distribusi gas dan air. Sedangkan untuk industri teknologi tinggi (*high-tech*), klasifikasi merujuk pada entitas yang intensif pengetahuan (*knowledge-intensive*) dengan investasi signifikan pada sumber daya tak berwujud seperti penelitian dan pengembangan (R&D).

Metode Analisis

Metode analisis di bawah ini digunakan untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris, keberagaman gender dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan frekuensi rapat dewan komisaris bersama dengan variabel kontrol terhadap tingkat pengungkapan risiko pada laporan terintegrasi di Indonesia.

$$IPR = \alpha_0 + \beta_1UDK + \beta_2KGDK + \beta_3IDK + \beta_4FRDK + \beta_5PROF + \beta_6UkP + \beta_7UmP + \beta_8ITT + \beta_9SL + \beta_{10}UKA + \varepsilon$$

Unruk menganalisis model penelitian, digunakan metode regresi menggunakan alat SPSS.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Penentuan subjek dilakukan secara sengaja berdasarkan seperangkat kriteria inklusi yang telah ditetapkan guna memastikan sampel representatif terhadap tujuan penelitian.

Tabel 2
Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2024	838
2	Perusahaan non keuangan yang tidak menerbitkan laporan terintegrasi pada tahun 2024 tidak digunakan pada penelitian	(476)
3	Perusahaan non keuangan tahun 2024 yang laporan terintegrasinya tidak terdapat data yang berkaitan tentang variabel independen dan variabel kontrol penelitian.	(209)
4	Data <i>Outlier</i>	(14)
Total Sampel Penelitian		153

Hasil dan Pembahasan
Analisis Deskriptif

Tabel 3 menyajikan hasil analisis deskriptif yang mencakup jumlah observasi (N), rentang nilai (minimum dan maksimum), rata-rata, serta standar deviasi untuk setiap variabel penelitian yang digunakan.

Tabel 3
Analisis Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Variabel Dependen					
IPR	139	35	45	40,69	2,274
Variabel Independen					
UDK	139	2	9	3,40	1,443
KGDK	139	11,11%	100,00%	40,1570%	17,47228%
IDK	139	25,00%	80,00%	42,6721%	10,63072%
FRDK	139	4	36	11,38	4,460
Variabel Kontrol					
PROF	139	-520,55%	103,72%	0,0292%	46,39520%
UKP	139	22,931	32,087	27,713	1,795
UmP	139	3	73	30,26	16,674
ITT	139	0	1	0,22	0,413
SL	139	0	1	0,66	0,475
UKA	139	2	4	3,01	0,190

Catatan : Singkatan diterapkan sesuai notasi : Indeks Pengungkapan Risiko (IPR), Ukuran Dewan Komisaris (UDK), Keragaman Gender Dewan Komisaris (KGDK), Independensi Dewan Komisaris (IDK), Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (FRDK), Profitabilitas (PROF), Ukuran Perusahaan (UKP), Umur Perusahaan (UmP), Industri Teknologi Tinggi (ITT), Sensitivitas Lingkungan (SL), Ukuran Komite Audit (UKA)

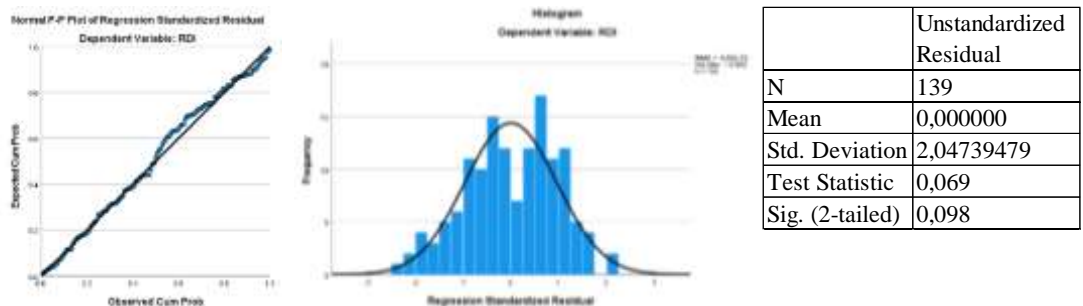
Sumber : Output SPSS, data sekunder yang diolah 2026

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan nilai residual dalam model regresi terdistribusi secara normal guna menjamin validitas inferensi statistik. Evaluasi distribusi data dilakukan melalui dua pendekatan :

- Analisis visual** : Residual dinyatakan normal jika grafik histogra simetris menyerupai kurva lonceng dan titik-titik pada *Normal Probability Plot (P-Plot)* menyebar mengikuti garis diagonal.
- Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov** : Menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*, di mana data disimpulkan terdistribusi normal apabila nilai *asympt. Sig. (2-tailed)* melebihi tingkat signifikansi 0,05 (*p-value > 0,05*).

Gambar 1
Uji Normalitas



Sumber : Output SPSS, data sekunder yang diolah 2026

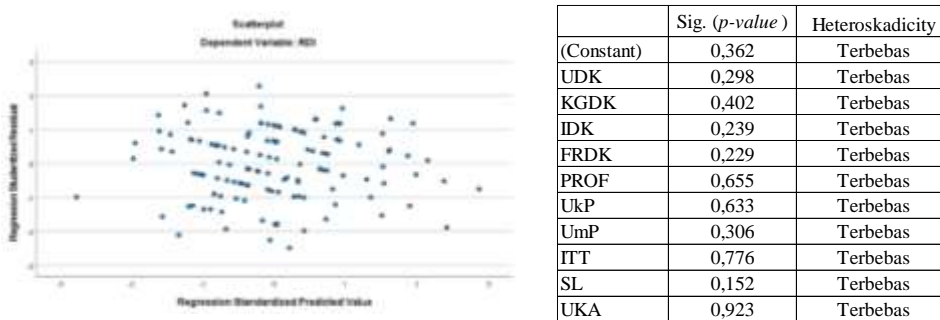
Berdasarkan gambar 1, hasil Uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-Tailed)* sebesar 0,098 ($p\text{-value} > 0,05$), sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Secara visual, grafik histogram membentuk kurva lonceng simetris dan titik pada *Normal P-Plot* terkonsentrasi di sepanjang garis diagonal. Dengan demikian, model regresi memiliki basis distribusi yang kuat untuk tahap pengujian hipotesis.

Uji Heteroskadasitas

Uji heteroskadasitas bertujuan mendeteksi ketidaksamaan varians residual antar observasi guna memastikan model memenuhi kriteria homoskadasitas. Identifikasi dilakukan melalui dua pendekatan :

1. **Analisis Visual (*scatterplot*)**: Residual dinyatakan memenuhi asumsi homoskadasitas jika titik-titik pada *scatterplot* secara acak tanpa membentuk pola geometris tertentu di sekitar angka nol.
2. **Uji Glejser** : Sebagai konfirmasi statistik formal, Uji Glejser diterapkan dengan tingkat signifikansi (α) 0,05. Model dinyatakan bebas heteroskadasitas jika nilai signifikansi variabel independen terhadap nilai absolut residual lebih besar dari 0,05 ($Sig. > 0,05$).

Gambar 2
Uji Heteroskadasitas



Sumber : Output SPSS, data sekunder yang diolah 2026

Berdasarkan gambar 2 Uji Heteroskadasitas, seluruh variabel prediktor dalam Uji Glejser memiliki $p\text{-value} > 0,05$ terhadap nilai absolut residual. Hasil ini diperkuat oleh inspeksi *scatterplot* yang menunjukkan distribusi residual secara acak tanpa membentuk pola tertentu. Dengan demikian, model regresi dinyatakan terbebas dari gangguan heteroskadasitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk memastikan tidak terdapat hubungan korelasi yang sempurna antar variabel independen guna menghindari bias pada nilai signifikansi parameter. Deteksi dilakukan dengan merujuk pada batasan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* dengan kriteria sebagai berikut :

1. **Bebas Multikolinieritas** : Jika nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ dan Nilai *VIF* $\leq 0,10$.
2. **Terdapat Multikolinieritas** : Jika nilai *Tolerance* $< 0,10$ atau Nilai *VIF* > 10 .

Tabel 4
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Multicollinearity
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
UDK	0,498	2,007	Terbebas
KGDK	0,631	1,585	Terbebas
IDK	0,773	1,294	Terbebas
FRDK	0,923	1,084	Terbebas

PROF	0,953	1,049	Terbebas
UkP	0,603	1,657	Terbebas
UmP	0,713	1,403	Terbebas
ITT	0,811	1,234	Terbebas
SL	0,750	1,334	Terbebas
UKA	0,855	1,169	Terbebas

Catatan : Singkatan diterapkan sesuai notasi : Indeks Pengungkapan Risiko (IPR), Ukuran Dewan Komisaris (UDK), Keragaman Gender Dewan Komisaris (KGDK), Independensi Dewan Komisaris (IDK), Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (FRDK), Profitabilitas (PROF), Ukuran Perusahaan (UkP), Umur Perusahaan (UmP), Industri Teknologi Tinggi (ITT), Sensitivitas Lingkungan (SL), Ukuran Komite Audit (UKA)

Sumber : Output SPSS, data sekunder yang diolah 2026

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dan kontrol memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Temuan ini mengindikasikan tidak adanya hubungan korelasi yang signifikan antar variabel prediktor. Dengan demikian, asumsi bebas multikolinieritas dalam model regresi dinyatakan terpenuhi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 mengukur sejauh mana variabilitas variabel dependen dijelaskan oleh kombinasi variabel prediktor dalam model. Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1; semakin mendekati satu, semakin superior kemampuan model dalam menjelaskan fenomena yang dikaji.

1. Nilai R^2 mendekati 0: Menunjukkan kapabilitas variabel independen yang terbatas, di mana variasi lebih banyak dipengaruhi faktor di luar model.
2. Nilai R^2 mendekati 1 : Mencerminkan kekuatan penjelas yang tinggi dan kemampuan prediksi model yang hampir sempurna terhadap variasi data.

Tabel 5
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square (R^2)	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,435	0,189	0,126	2,126

Sumber : Output SPSS, data sekunder yang diolah 2026

Hasil uji pada Tabel 5 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,126 (12,6%). Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen dan kontrol secara kolektif berkontribusi sebesar 12,6% terhadap variasi indeks pengungkapan risiko, sementara 87,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor di luar model. Model memiliki *Standard Error of Estimate* (SEE) sebesar 2,126 yang menunjukkan tingkat akurasi prediksi model terhadap variabel dependen.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan memverifikasi pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Berdasarkan rujukan Ghazali (2021) dan toleransi tingkat kesalahan penelitian ilmu sosial hingga 10% seperti pada Raimo et al. (2022), kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

1. **Hipotesis diterima** : jika nilai *p-value* < 0,05 atau < 0,10, menunjukkan adanya pengaruh secara parsial.
2. **Hipotesis ditolak**: jika nilai *p-value* > 0,10, menunjukkan variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara statistik

Tabel 6
Uji Parsial (Uji t)

Model	Variables	Coefficients	t-Statistic	Prob.
1	(Constant)	27,831	6,400	0,000
	UDK	-0,345	-1,942	0,054*
	KGDK	-0,022	-1,685	0,094*
	IDK	0,023	1,184	0,238
	FRDK	-0,009	-0,204	0,839
	PROF	-0,005	-1,335	0,184
	UkP	0,421	3,241	0,002***
	UmP	0,016	1,215	0,227
	ITT	-0,203	-0,417	0,677
	SL	0,345	0,784	0,434
	UKA	0,572	0,556	0,579

Catatan : Singkatan diterapkan sesuai notasi : Indeks Pengungkapan Risiko (IPR), Ukuran Dewan Komisaris (UDK), Keragaman Gender Dewan Komisaris (KGDK), Independensi Dewan Komisaris (IDK), Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (FRDK), Profitabilitas (PROF), Ukuran Perusahaan (UkP), Umur Perusahaan (UmP), Industri Teknologi Tinggi (ITT), Sensitivitas Lingkungan (SL), Ukuran Komite Audit (UKA).

* = Signifikan pada tingkat 10%

** = Signifikan pada tingkat 5%

*** = Signifikan pada tingkat 1%

Sumber : Output SPSS, data sekunder yang diolah 2026

Berdasarkan nilai *Coefficient* pada tabel 6, diperoleh model regresi yaitu :

$$\text{IPR} = 27,831 + -0,345\text{UDK} + -0,022\text{KGDK} + 0,023\text{IDK} + -0,009\text{FRDK} + -0,005\text{PROF} + 0,421\text{UkP} + 0,016\text{UmP} + -0,203\text{ITT} + 0,345\text{SL} + 0,572\text{UKA}$$

Hasil pengujian menunjukkan pada Tabel 6 menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris (UDK) berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan risiko dengan koefisien -0,345 (*p-value* = 0,054). Hasil tersebut menyatakan bahwa hipotesis 1 diterima yaitu Ukuran Dewan Komisaris (UDK) berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko pada laporan terintegrasi. Temuan ini mendukung perspektif inefisiensi dalam Teori Keagenan (*Agency Theory*), yang berargumen bahwa dewan yang terlalu besar (*oversized board*) cenderung mengalami disfungsi koordinasi dan peningkatan biaya pemantauan (*monitoring costs*) yang menghambat efektivitas pengawasan terhadap manajemen. Kondisi ini selaras dengan pemikiran (Jensen & Meckling, 1976) serta (Fama & Jensen, 1983), di mana fragmentasi hak pengendalian dalam struktur dewan yang gemuk justru memperlebar asimetri informasi dan memicu fenomena “penumpang gelap” (*free rider*) di antara anggota dewan. Diskrepansi hasil dengan studi Raimo et al. (2022) mengindikasikan bahwa pada sistem *two-tier board* di Indonesia, beban birokrasi internal dewan yang lebih dominan daripada manfaat diversifikasi keahlian, sehingga justru menurunkan transparansi informasi risiko sesuai dengan temuan Al-Maghzom et al. (2016).

Hasil pengujian pada Tabel 6 menunjukkan bahwa Keanekaragaman Gender Dewan Komisaris (KGDK) berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan risiko dengan koefisien -0,022 (*p-value* = 0,094). Hasil tersebut menyatakan bahwa hipotesis 2 diterima yaitu Keanekaragaman Gender Dewan Komisaris (KGDK) berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan risiko pada laporan terintegrasi. Temuan ini mendukung *Upper Echelons Theory* yang menyatakan bahwa pilihan strategis organisasi merupakan refleksi dari karakteristik kognitif pembuat keputusan, di mana filter kognitif yang lebih konservatif pada dewan komisaris yang beragam gender cenderung memandang pengungkapan risiko luas sebagai ancaman stabilitas (Hambrick, 2007; Hambrick & Mason, 1984). Fenomena ini juga selaras dengan *Behavioral Agency Theory* yang menyoroti potensi disfungsi akibat konflik kognitif dan masalah kohesi (*cohesion problems*) dalam kelompok heterogen, sehingga menghambat konsensus pelaporan risiko yang kompleks (Medidjati et al., 2023). Diskrepansi hasil dengan studi Raimo et al. (2022) mengindikasikan bahwa pada konteks Indonesia, kehadiran perempuan cenderung memperkuat nilai kehati-hatian (*prudence*) dan perilaku menghindari risiko (*risk averse*), yang bermanifestasi pada

pembatasan informasi guna memitigasi volatilitas pemangku kepentingan, sejalan dengan temuan (Chandra et al., 2024).

Hasil pengujian pada Tabel 6 menunjukkan bahwa Independensi Dewan Komisaris (IDDK) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko dengan koefisien 0,023 (p -value = 0,238). Hasil tersebut menyatakan bahwa hipotesis 3 ditolak yaitu Independensi Dewan Komisaris (IDK) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan risiko pada laporan terintegrasi. Penolakan hipotesis ini mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen di Indonesia belum efektif dalam menjalankan fungsi *check and balance* sebagaimana diasumsikan dalam Teori Agensi. Secara teoritis, kegagalan signifikansi ini selaras dengan konsep Jensen & Meckling (1976) dan Seta & Setyaningrum (2018), di mana penunjukan komisaris independen kemungkinan baru menyentuh aspek formalitas kepatuhan (*compliance*) tanpa alokasi biaya pemantauan substantif untuk mereduksi asimetri informasi. Hal ini diperkuat oleh perspektif Fama & Jensen (1983) dan Indriana & Kawedar (2019) mengenai lemahnya hak kontrol nyata dan akses informasi operasional yang dimiliki pihak eksternal, sehingga fungsi ratifikasi dan pemantauan tidak berdampak nyata terhadap transparansi. Diskrepansi hasil dengan studi Raimo et al. (2022) menegaskan bahwa di pasar modal Indonesia, peran komisaris independen cenderung bersifat simbolis guna memenuhi regulasi OJK daripada menjadi instrumen monitoring aktif, sejalan dengan temuan Indriana & Kawedar (2019), Seta & Setyaningrum (2018) serta (Al-Maghzom et al., 2016).

Hasil pengujian pada Tabel 6 menunjukkan bahwa Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (IDDK) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko dengan koefisien -0,009 (p -value = 0,839). Hasil tersebut menyatakan bahwa hipotesis 4 ditolak yaitu Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (IDK) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan risiko pada laporan terintegrasi. Penolakan ini mengindikasikan bahwa kuantitas pertemuan dewan komisaris di Indonesia belum efektif sebagai mekanisme pengawasan aktif sesuai postulat Teori Agensi. Secara teoritis, kegagalan signifikansi ini selaras dengan konsep Jensen & Meckling (1976), di mana rapat yang tinggi tanpa evaluasi substantif hanya menjadi biaya agensi tambahan yang gagal mereduksi asimetri informasi. Hal ini diperkuat oleh perspektif Fama & Jensen (1983) yang menekankan bahwa efektivitas pengendalian keputusan (*decision control*) bergantung pada kualitas ratifikasi, bukan sekadar frekuensi fisik. Diskrepansi hasil dengan studi (Raimo et al., 2022) mengisyaratkan bahwa pada emiten di Indonesia, aktivitas rapat cenderung bersifat seremonial demi pemenuhan kepatuhan (*compliance*) atau bersifat reaktif (*fire-fighting*) terhadap masalah internal, sehingga tidak berkorelasi linier dengan peningkatan transparansi risiko sebagaimana temuan (Al-Dubai & Alotaibi, 2023).

Hasil pengujian pada Tabel 6 bahwa di seluruh variabel kontrol, hanya Ukuran Perusahaan (UkP) yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan risiko dengan koefisien 0,421 (p -value = 0,002). Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan aset yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk menyajikan laporan terintegrasi yang transparan guna menjaga legitimasi di pemangku kepentingan. Sementara itu, variabel kontrol lainnya yang meliputi Profitabilitas (PROF), Umur Perusahaan (UmP), Industri Teknologi Tinggi (ITT), Sensitivitas Lingkungan (SL), dan Ukuran Komite Audit (UKA) tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik (p -value > 0,10). Ketidaksignifikanan ini menyiratkan bahwa karakteristik operasional dan industri tersebut bukan merupakan determinan utama yang mendinging kedalaman disklosur risiko pada perusahaan non-keuangan di Indonesia untuk periode 2024, di mana kebijakan transparansi lebih didominasi oleh faktor skala perusahaan dibandingkan kinerja keuangan maupun komite penunjang.

KESIMPULAN

Simpulan

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan risiko dalam laporan terintegrasi ada perusahaan non-keuangan di Indonesia tahun 2024. Hasil penelitian membuktikan bahwa Ukuran Dewan Komisaris dan Keanekaragaman Gender Dewan Komisaris memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko dalam laporan terintegrasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Independensi Dewan Komisaris dan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terdapat pengaruh yang tidak signifikan terhadap pelaporan risiko tersebut. Sementara itu, pada variabel kontrol, hanya Ukuran Perusahaan yang secara konsisten berpengaruh positif dan signifikan terhadap informasi risiko perusahaan.

Keterbatasan

1. **Kemampuan Prediksi Model** : Nilai *Adjusted R²* sebesar 12,6% menunjukkan bahwa variasi Indeks Pengungkapan Risiko lebih banyak dijelaskan oleh faktor lain di luar model (87,4%).
2. **Metode Analisis Konten** : Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam *content analysis* memiliki keterbatasan dalam menangkap nuansa kualitatif dan interpretasi kontekstual yang mendalam dibandingkan analisis kognitif manusia.

Saran

1. **Pengembangan Model** : Mengeksplorasi faktor-faktor lain di luar model saat ini guna meningkatkan nilai *Adjusted R²*, mengingat proporsi variasi yang tidak dijelaskan masih cukup besar (87,4%)
2. **Validasi Analisis Konten** : Melakukan *cross-validation* menggunakan beberapa model AI yang berbeda atau verifikasi manual pada sampel acak untuk memastikan akurasi interpretasi kontekstual sesuai dengan karakteristik industri di Indonesia.

REFERENSI

- Akram, F., & Abrar UI Haq, M. (2022). Integrating agency and resource dependence theories to examine the impact of corporate governance and innovation on firm performance. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2152538>
- Al-Dubai, S. A. A., & Alotaibi, K. O. (2023). Examining the relationship between board characteristics and financial risk disclosure: A longitudinal analysis based on agency theory. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 7(4), 137–151. <https://doi.org/10.22495/cgobrv7i4p12>
- Al-Maghzom, A., Hussainey, K., & Aly, D. (2016). Corporate governance and risk disclosure: Evidence from Saudi Arabia. *Corporate Ownership and Control Journal*, 13(2).
- Al-Matari, Y. A., & Al-Dubai, S. A. A. (2025). Strengthening financial risk disclosure through governance committees to advance sustainable corporate practices in Saudi financial firms. *Discover Sustainability*, 6(1). <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01991-3>
- Anggraeni, H., & Iradianty, A. (2023). Analisis Good Corporate Governances dan Pengungkapan Manajemen Risiko pada Perusahaan Farmasi. *Jurnal Orientasi Bisnis Dan Entrepreneurship (JOBS)*, 4(1), 81–94. <https://doi.org/10.33476/jobs.v4i1.3609>
- Anisa, W. G., & Prastiwi, A. (2012). *Analisis faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko (Studi empiris pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010)*.
- Cerbioni, F., & Parbonetti, A. (2007). Exploring the effects of corporate governance on intellectual capital disclosure: An analysis of European biotechnology companies. *European Accounting Review*, 16(4), 791–826. <https://doi.org/10.1080/09638180701707011>
- Chandra, B., Theresia, T., & Ivone, I. (2024). The Influence Of Gender Diversity Of The Board Of Directors On Risk Disclosure in Indonesia. *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 8(2), 118–129. <https://doi.org/10.30741/assets.v8i2.1267>
- Ekananda, V., Suryani, A. W., & Yusoff, Z. Z. M. (2025). Corporate Governance and Corporate Risk Disclosure. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 12(1), 1–26. <https://doi.org/10.17977/um004v12i12025p001>
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *Journal of Law and Economics*, XXVI. http://papers.ssrn.com/sol3/paper.taf?ABSTRACT_ID=94034
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, B., & Zakiyah, Y. N. (2017). Pengaruh mekanisme corporate governance, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap risk management disclosure. *Ekspansi*, 9(1), 1–18.



- Hambrick, D. C. (2007). Upper Echelons Theory: An Update. In *Source: The Academy of Management Review* (Vol. 32, Number 2). <https://about.jstor.org/terms>
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers. *Source: The Academy of Management Review*, 9(2), 193–206. <https://www.jstor.org/stable/258434>
- Hopkins, P. (2017). *Fundamentals of Risk Management 4Th Edition* (4th ed.). Kogan Page Limited.
- Ibrahim, A. E. A., Hussainey, K., Nawaz, T., Ntim, C., & Elamer, A. (2022). A systematic literature review on risk disclosure research: State-of-the-art and future research agenda. In *International Review of Financial Analysis* (Vol. 82). Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102217>
- IIRC. (2021). *IR Framework*. www.integratedreporting.org
- Indriana, V., & Kawedar, W. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan dan mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan risiko. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 8(1).
- Januarti, I., Aldisa, K. J., & Ratu, D. M. (2025). Unrevealing risk disclosure in Indonesia: The role of governance and corporate attributes. *JURNAL KAJIAN AKUNTANSI*, 60–73. <https://doi.org/10.33603/jka>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, (4), 305–360. <http://ssrn.com/abstract=94043><http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Juniarti, J., Santoso, A. C., Hermawan, C. F., Darmasaputra, A., & Wright, J. (2025). Voluntary Adoption of Integrated Reporting and Firm Valuation: The Moderating Effect of ESG Performance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(2), 131–141. <https://doi.org/10.9744/jak.26.2.131-141>
- Komite Nasional Kebijakan Governansi. (2021). *Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021*.
- Lidya Primadona, I. A., Mita, N. P., Murti, A., Kusuma, N., Mahaputra, A., Sudiartana, I. M., Kadek Bagiana, I., & Denpasar, U. M. (2024). Pengaruh Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko: Peran Moderasi Komite Audit. In *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* (Vol. 3, Number 2).
- Mbithi, E., Moloi, T., & Wangombe, D. (2022). Corporate risk disclosure: A systematic literature review and future research agenda. In *Cogent Business and Management* (Vol. 9, Number 1). Cogent OA. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2105569>
- Medidjati, R. A., Heryana, T., & Hartono, P. (2023). Keragaman Gender di Dewan Komisaris dan Risiko Perusahaan: Perspektif Teori Agensi Perilaku. *Jurnal Riset Manajemen*, 152–157. <https://ejournal.upi.edu/index.php/image>
- Melani, U., & Amin, M. Al. (2016). *Diversifikasi produk, profitabilitas, dan umur perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko pada industri perbankan dan manufaktur*.
- Muslih, M., & Damayanti, D. (2025). Pengungkapan Manajemen Risiko: Ukuran Dewan Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan, dan Keberagaman Gender Dewan Komisaris dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 820–836.
- Muslih, M., & Maghfiroh, O. I. (2023). Pengaruh good corporate governance terhadap pengungkapan manajemen risiko perusahaan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 7.
- Ntim, C. G., Lindop, S., & Thomas, D. A. (2013). Corporate governance and risk reporting in South Africa: A study of corporate risk disclosures in the pre- and post-2007/2008 global financial crisis periods. *International Review of Financial Analysis*, 30, 363–383. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2013.07.001>



- Raimo, N., Nicolò, G., Tartaglia Polcini, P., & Vitolla, F. (2022). Corporate governance and risk disclosure: evidence from integrated reporting adopters. *Corporate Governance (Bingley)*, 22(7), 1462–1490. <https://doi.org/10.1108/CG-07-2021-0260>
- Salsabila, Z. H., & Hidayat, S. (2024). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2020-2022. *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, 3(2), 11–27. <http://ejournal.unisnu.ac.id/jrei/>
- Seta, A. T., & Setyaningrum, D. (2018). Corporate Governance and Risk Disclosure: Indonesian Evidence. *Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR)*.
- Setiawan, A. (2016). Integrated Reporting: Are Indonesian Companies Ready to Do It? In *Asian Journal of Accounting Research* (Vol. 1).
- Viola, B., Aryanto, J., Marsetio, N. C., & Yuliati, R. (2023). The Impacts of Board Characteristics and Size on Risk Disclosure: Evidence from Indonesian Mining Firms. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 25(3), 255–272. <https://doi.org/10.14414/jebav.v25i3.3435>